



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 September 2024/Khusus - Calon PN)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KOTA METRO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG IMAN SANTOSO**
2. Jabatan : **CALON WALIKOTA**
3. NHK : **968562**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.742.163.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , HASIL SENDIRI Rp. 648.000.000
2. Tanah Seluas 1.790 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , HASIL SENDIRI Rp. 961.123.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.720 m2/552 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , HASIL SENDIRI Rp. 923.640.000
4. Tanah Seluas 3.340 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , HASIL SENDIRI Rp. 835.000.000
5. Tanah Seluas 1.656 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , HASIL SENDIRI Rp. 993.600.000
6. Tanah Seluas 419 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , HASIL SENDIRI Rp. 293.300.000
7. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , HASIL SENDIRI Rp. 87.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **2.075.080.000**

1. MOBIL, TOYOTA HILUX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 442.200.000
2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 40.430.000



3. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
385.000.000
4. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
600.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
6. MOBIL, ISUZU JEEP Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
599.450.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	28.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	500.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.345.743.000
III. HUTANG	Rp.	3.500.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.845.743.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.